

Pemanfaatan pekarangan dengan budidaya sayuran untuk pemberdayaan keluarga miskin di Kabupaten Sidrap

Abd. Muis¹, Muhiddin Palennari², Hartati³

^{1,2,3}Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar

Abstract. A house garden is potential to be managed for the cultivation of vegetables for the fulfillment of nutrition and a relative reduction in the cost of living of poor families. The condition of the land and the limited knowledge and life skills of the poor in the Maritengngae District, Sidrap Regency, became the main limiting factor for the use of the garden for cultivation. The Community Service-Learning and Community Empowerment activity program (KKN = PPM) of UNM organized program for target families to provide knowledge and skills in the manufacture of organic fertilizers and cultivation of hydroponic systems. The goal was achieved by using training methods, demonstration plots and mentoring. The activities that were realized included: a) increased knowledge and skills of target residents in making organic fertilizer from household waste, and vegetable cultivation of hydroponic systems; and b) fulfillment of the need for several types of vegetables through utilization of the garden for cultivation. If this activity is sustainable and well developed, then the needs for the vegetable foodstuffs of the target residents will be fulfilled independently.

Keywords: poor family, vegetable cultivation, garden

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia terus dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa dengan memerangi kemiskinan. Kemiskinan disebut sebagai ketidakmampuan seseorang atau keluarga memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004), terutama dalam hak dasar pangan. Pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan keluarga. Namun demikian, jumlah penduduk miskin tetap tergolong tinggi, yakni 10,7% (27,76 juta orang) pada bulan September 2016 (BPS, 2017). Tingginya angka kemiskinan ini terkait dengan rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, khususnya pangan.

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan di sektor pangan terlihat dengan dikeluarkannya Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kebijakan ini bertujuan mendorong percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan melalui kerjasama sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu wujud implementasi kebijakan tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk menghasilkan bahan pangan yang sehat, diantaranya adalah budidaya sayuran organik dan hidroponik.

Menanam sendiri sayuran memiliki peranan strategis untuk meningkatkan keanekaragaman pola konsumsi pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Pemanfaatan pekarangan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sayuran sehat pada tingkat rumah tangga sehingga memungkinkan peningkatan relatif pendapatan keluarga. Harapan ini menjadi lebih berarti pada kelompok masyarakat tertentu, seperti keluarga kurang mampu atau penerima rastra. Pemberdayaan warga miskin melalui pemanfaatan pekarangan sebagai kebun sayuran terbukti berkontribusi mengurangi kerawanan pangan dan gizi keluarga (Carney et al., 2012), meningkatkan pendapatan keluarga dan pengentasan kemiskinan (Talukder et al., 2001). Alat penting yang efektif dalam pemberdayaan adalah memberikan pendidikan yang dapat mengubah kondisi kehidupan dengan pengetahuan dan keterampilan yang aplikabel.

Kecamatan Maritengngae terbagi menjadi 5 desa dan 7 kelurahan, terletak pada 119°47" BT dan 3°5" LS, memiliki luas wilayah 65,9 km² pada ketinggian 34 mdpl, topografi sangat datar (100%), dengan luas tanah pekarangan 411,48 ha. Suhu udara rata-rata 21°C - 32°C dengan curah hujan 1280 mm/tahun. Data kependudukan tahun 2017, Kecamatan Maritengngae dihuni oleh 50.172 jiwa. Dari jumlah ini, 482 (0,96%) tercatat adalah warga penerima beras miskin (Data proyeksi Kecamatan, 2017).

Upaya untuk mengoptimalkan fungsi pekarangan sebagai kebun sayur dibatasi oleh jenis tanah. Sebagian besar (50,39%) lahan di Kabupaten Sidrap adalah tipe podsolik (Pemda Kabupaten Sidrap, 2014). Tanah podsolik (ultisol) memiliki ciri: kejenuhan air sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan, kadar bahan organik rendah dan hanya pada permukaan tanah, penyimpanan hara rendah (Prasetyo & Suriadikarta,

2006), karena itu tidak cocok untuk tanaman semusim. Untuk mengoptimalkan fungsi pekarangan, perlu adanya inovasi teknologi budidaya sayuran. Untuk mengatasi kondisi tanah yang tidak subur, perlu dilakukan dengan pemberian pupuk organik seperti kompos. Bagi rumah tangga dengan lahan terbatas dan/atau tanpa halaman dapat diatasi dengan budidaya sayuran sistem hidroponik.

Permasalahan yang dialami keluarga miskin di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap adalah terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga dan budidaya sistem hidroponik dalam pemanfaatan pekarangan untuk budidaya sayuran, sementara di satu sisi keluarga miskin setiap hari menghasilkan limbah organik dari rumah tangga mereka yang juga memaksa mereka membayar dana retribusi sampah.

II. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan KKN-PPM di Kecamatan Maritengngae melibatkan 46 orang mahasiswa (15 pria dan 31 wanita) yang menempati tiga kelurahan dengan sasaran keluarga kurang mampu/penerima rastra. Penentuan keluarga sasaran didasarkan pada hasil survei Pola Pangan Harapan (PPH) dan kesiapan keluarga untuk terlibat aktif dalam program yang sudah direncanakan. Survei PPH yang dilaksanakan oleh mahasiswa dimaksudkan untuk menentukan keluarga sasaran yang akan terlibat dalam program. Hasil *survey* selanjutnya dikonsultasikan dengan keluarga berangkutan untuk memastikan kesiapannya mengikuti program KKN-PPM.



Gambar 1. Survei pola pangan harapan warga sasaran



Dari 308 Kepala Keluarga (KK) sasaran yang disurvei, 91 KK yang berkesempatan mengikuti program KKN-PPM. Pelaksanaan program dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi aktif dengan metode pelatihan, percontohan dan pendampingan.

1. Pelatihan pembuatan pupuk organik cair, kompos, dan budidaya sayuran sistem hidroponik.



Gambar 2. Pelatihan pembuatan pupuk organik cair



Gambar 3. Pelatihan pembuatan pupuk kompos takakura

2. Demonstrasi dan piloting (demplot) dan pendampingan budidaya sayuran



Gambar 4. Demplot budidaya sayuran

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan Rumah Pupuk Organik

Telah dilakukan pelatihan pembuatan kompos, POC dan MOL untuk mengoptimalkan fungsi lahan pekarangan rumah guna keperluan budidaya sayuran. Kompos dibuat dengan menggunakan bahan baku limbah organik rumah tangga dengan metode takakura. Digunakan EM4 sebagai bioaktivator karena mol yang dibuat belum jadi. Produk hasil pelatihan dan pendampingan yang terlihat dalam gambar berikut, diproduksi oleh warga sasaran menjelang akhir program KKN-PPM.



Gambar 5. Produk kompos dan POC warga sasaran

Kompos takakura dan pupuk organik cair (POC) yang dihasilkan selama pelatihan dan pendampingan telah digunakan dalam kegiatan budidaya sayuran di masing-masing pekarangan rumah keluarga sasaran dengan menanam gambas, cabe, kangkung, dan paria.

B. Pengembangan Sayuran Pekarangan

Pengembangan sayuran organik untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan tiga cara, yakni tanam langsung di tanah, tanam di wadah dan

sistem hidroponik. Cara tanam langsung di tanah dilakukan di pekarangan pada tanah yang relatif subur dengan penambahan kompos dan POC, sedangkan pada tanah yang kurang subur penanaman dilakukan dalam wadah. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dilakukan dengan memberikan pupuk kompos dan/atau POC. Selain itu budidaya sayuran organik juga dilakukan dengan sistem hidroponik, terutama bagi keluarga dengan pekarangan sempit dan tidak ada lahan.



Gambar 6. Sayuran pekarangan

Hasil kegiatan monev 1 dan 2 di lokasi, terungkap bahwa: 1) kegiatan program KKN-PPM dapat mengakselerasi partisipasi masyarakat khususnya bagi keluarga kurang mampu/penerima rastra. Hasil ini merupakan trend positif dari warga sasaran karena rendahnya partisipasi seseorang di dalam kegiatan ekonomi produktif merupakan salah satu isu dalam persoalan kemiskinan (Nainggolan, 2012). Pendekatan partisipasi aktif yang diterapkan, nyata memberikan tanggung jawab kepada keluarga sasaran sebagaimana dikemukakan oleh Fadlina, dkk, 2013. 2) dibutuhkan waktu tinggal lebih lama untuk dapat melihat hasilnya sebagaimana ditargetkan, sedangkan jam kerja efektif mahasiswa sudah tercapai yakni 296 jam/mahasiswa.

Capaian hasil akhir program khususnya dalam pengembangan sayuran organik bagi keluarga miskin, menjadi suatu catatan penting bahwa program ini pada dasarnya bersifat menginisiasi keluarga kurang mampu, memberikan pilihan hidup untuk bisa mengentaskan keluarganya dari kondisi keterbatasan ekonomi, meningkatkan daya lenting bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Program KKN-PPM telah menjalankan kampanye bahwa pemberian pilihan hidup

merupakan salah satu matra program pemberdayaan masyarakat Kemen. DPD TT (2016).

Tingkat keberhasilan program ini terkait dengan beberapa pihak, termasuk pemerintah setempat dan tokoh masyarakat serta keluarga sasaran sendiri. Kesediaan keluarga untuk terlibat dalam program ini harusnya dimaknai sebagai keinginan kuat untuk keluar dari kondisi keterbatasan. Untuk maksud tersebut dibuthkan pelibatan aktif pemerintah dan tokoh masyarakat sebagai kelompok kolektif-kolegial. Menurut Tanjung dalam Budiyo (2011), ketiadaan pelibatan diri pemerintah dan tokoh masyarakat, maka berbagai program dapat terhenti, berakhir kegagalan, termasuk program KKN-PPM ini, sebagaimana program pemberdayana ekonomi masyarakat lainnya yang berakhir dengan kegagalan.

Keberlanjutan dan keberhasilan program ini memerlukan tindakan pembinaan dan dukungan yang maksimal. Untuk mengadopsi suatu teknologi yang baru dibidang tani sangat diperlukan suatu program lanjutan dan berkesinambungan dari waktu ke waktu secara optimal. Walaupun pelaksanaan program KKN-PPM ini dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, hasilnya teridentifikasi mengalami kemajuan pesat. Masyarakat dari keluarga kurang mampu telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya sayuran organik dan kegiatan terkait lainnya dan telah membangkitkan motivasi kuat keluarga mampu.

Dengan peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan motivasi warga sasaran untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka dengan budidaya sayuran dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan relatif keluarga sebagaimana yang diperjuangkan kementerian pembangunan desa.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan KKN-PPM ini memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap melalui pengembangan sayuran organik. Dari pelaksanaan program dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi peningkatan pengetahuan, dan keterampilan keluarga miskin dalam pembuatan pupuk organik berbahan baku limbah organik rumah tangga.
2. Keluarga miskin/penerima rastra yang menjadi sasaran program telah memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya sayuran dengan menggunakan pupuk organik hasil pelatihan.
3. Peningkatan relatif pendapatan keluarga miskin dapat tercapai dengan baik jika budidaya sayuran organik di pekarangan rumah mereka dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2017. Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2016. *Berita Resmi Statistik* No. 05/01/Th. XX, 3 Januari 2017.
- Budiyo, M. Agus Krisno. 2011. Optimasi Pengembangan Kelembagaan Industri Pangan Organik di Jawa Timur. *Jurnal Teknik Industri*. Vol. 12.No. 2.Hal.169-176.
- Carney, P.A., J.L. Hamada, R. Rdesinsky, L. Sprager, K.R. Nichols, B.Y. Liu, J.Pelayo, M.A. Sanches, & J.Shannon. 2012. Impact of a Community Gardening Project on Vegetable Intake, Food Security and Family Relationships: A Community-based Participatory Research Study. *J Community Health*. 2012 Aug; 37(4): 874–881.
- Fadlina, L.M., B. Supiyono, & S. Soeaidy. 2013. Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu). *J-PAL*, Vol. 4, No. 1, 2013
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016. Modul Pelatihan Petugas pendamping Desa. Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Megawati. 2014. Kecamatan Kulo Dalam Angka. BPS Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Nainggolan, M.C. 2012. Analisis Kemiskinan Struktural Masyarakat Petani (Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungulan Kabupaten Bogor). *Tesis*. PpsUniversitas Indonesia. [online], (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314649-T31154-Analisis%20kemiskinan.pdf>.) diakses tanggal 10 Agustus 2017.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 2014. Profil Wilayah. Kondisi Geologi. 2014. [online], (http://sidrapkab.go.id/index.php?Profil/detail_profil/17), diakses tanggal 20 Juni 2017.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Prasetyo, B.H. & D.A. Suriadikarta. 2006. Karakteristik, Potensi, Dan Teknologi Pengelolaan Tanah Ultisol Untuk Pengembangan Pertanian Lahan Kering Di Indonesia B.H. Prasetyo1) dan D.A. Suriadikarta2). *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(2), 2006.
- T.A., S. De Pee, A.Taher, A.Hall, R.Moench-Pfanner, M. W. Bloem. 2001. Improving food and nutrition security through homestead gardening in rural, urban and peri-urban areas in Bangladesh (resource paper).
- United Nations, Department of Social and Economic Affairs. Online survey on promoting empowerment of people in achieving poverty eradication, social integration and full employment integration and full employment and decent work for all; 2015. [online], (<http://www.un.org/esa/socdev/publications/FullSurveyEmpowerment.pdf>), diakses tanggal 20 Juni 2017.